**SIARAN PERS**

**Nomor: 224/UN3.23/MB/HM.01.03/2024**

**Terobosan Baru: Presidential Club untuk Mendorong Kesinambungan, Begini Tanggapan Dosen FISIP**

**Prabowo Wacanakan Bentuk Presidential Club, Dosen FISIP Nilai Itu Positif**

**Surabaya, 17 Mei 2024 -** Sejak masa Pemilu pada bulan Februari, pasangan Prabowo-Gibran telah banyak menuai kontroversi. Kontroversi yang menimbulkan konflik politik tersebut terjadi baik sebelum maupun sesudah Prabowo-Gibran dinyatakan sah sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia.

Baru-baru ini Prabowo Subianto kembali mengejutkan publik dengan wacananya untuk membentuk Presidential Club atau Klub Presiden. Sebagai Presiden terpilih, sudah sepantasnya Prabowo memiliki kebijakan yang akan dirinya laksanakan pada masa kepemimpinannya. Membentuk Klub Presiden sepertinya menjadi kebijakan pertama yang ingin Prabowo wujudkan.

Tentunya rencana pembentukan Klub Presiden menuai pro dan kontra dari para kalangan politisi dan masyarakat biasa. Klub Presiden dianggap dapat menjadi ancaman atau sebuah inovasi yang menguntungkan. Oleh karena itu, Dosen Ilmu Politik FISIP UNAIR Drs Haryadi MSi membagikan pandangannya terkait wacana Prabowo tersebut.

Menurutnya, pembentukan Klub Presiden merupakan sebuah gagasan terbaik dalam menjembatani presiden-presiden sebelumnya dengan presiden terpilih. Klub Presiden dapat menjadi sebuah terobosan baru yang dapat menguntungkan masyarakat dan pemerintah.

Menurutnya, program presiden yang sedang berjalan sering kali terhenti bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan. Ketika presiden sebelumnya tidak dapat menyelesaikan proyeknya, tidak ada jaminan proyek tersebut akan diteruskan oleh presiden yang terpilih.

Tidak adanya kesinambungan akan berakhir pada kerugian. Banyaknya proyek terbengkalai dari masa pemerintahan sebelumnya dinilai hanya menghamburkan anggaran negara.

“Kita butuh jembatan untuk menghubungkan presiden lama dengan presiden yang baru. Jembatan inilah yang nantinya akan membuat mereka tetap bertemu dan saling bertukar pikiran,” ujarnya.

“Karena, tanpa kesinambungan, lagi-lagi yang dirugikan pasti masyarakat. Contohnya, proyek hambalang, hasilnya hanya menghamburkan uang. Pada akhirnya, tetap masyarakat yang dirugikan karena dananya *kan* juga pasti melibatkan pajak dari masyarakat,” imbuh Haryadi.

Klub presiden telah banyak dibentuk di negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Dilansir dari hasil wawancara, Haryadi sendiri mendukung penuh pembentukan Klub Presiden. Hubungan baik antar presiden dapat mendorong kesinambungan pembangunan dari presiden sebelumnya kepada presiden baru.

“Di negara lain sudah ada. Bahkan, ada yang namanya jurnal buku presiden yang diteruskan ke presiden berikutnya untuk menjaga kesinambungan. Inilah yang menjadi kelebihan Klub Presiden. PR-PR yang sebelumnya belum dapat diselesaikan oleh presiden lama dapat dikerjakan oleh presiden yang baru,” tutur Haryadi.

“Tapi jangan sampai Klub Presiden ini hanya jadi forum minum teh di sore hari saja. Forum ini harus di formalkan, minimal dengan perlindungan hukum dari Peraturan Presiden. Jadi, implementasinya pun dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” pungkasnya.(\*)